

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA MALANG (STUDI KASUS KENDARAAN RODA DUA)

Untung Wahyudi¹, Erma Dwi Cahyaningsih², Sodik³, Hartini Prasetyaning Prawestri⁴

^{1,2,3}Universitas Widyagama Malang

Jl. Borobudur No.35, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142

Email: wuntung@yahoo.com

ABSTRAK

Peran serta aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak (wp) dalam bentuk membayar iuran pajak dapat membantu kelancaran aktivitas pembangunan. Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Jumlah sampel yaitu 100 responden yang terdaftar di kantor bersama Samsat Kota Malang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala likert. Teknik analisis data menggunakan metode analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat Kota Malang dipengaruhi oleh empat faktor yaitu pengetahuan program perpajakan, kedisiplinan wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan perpajakan serta kompetensi dan prosedur perpajakan.

Kata Kunci: Kepatuhan, analisis faktor, pajak kendaraan bermotor

ABSTRACT

The active participation of the community as taxpayers (wp) in the form of paying tax contributions can help smooth development activities. One source of local tax income is Motor Vehicle Tax (PKB). Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the tax revenues that affects the high regional income. Therefore, it is necessary to optimize the PKB revenue through various efforts that can increase the amount of income from this sector, one of which is by increasing the compliance of Vehicle Taxpayers. This research is a type of research using descriptive quantitative methods. The number of samples is 100 respondents who are registered in the office with Samsat Malang City. Data was collected using a questionnaire with a Likert scale. The data analysis technique used factor analysis method. The results showed that the compliance of motorized vehicle tax payers in the Malang City Samsat joint office was influenced by four factors, namely knowledge of taxation programs, taxpayer discipline, tax sanctions, tax services and tax competencies and procedures.

Keywords: Compliance, factor analysis, motor vehicle tax

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian suatu negara yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan usaha di seluruh sector perekonomian, baik formal maupun informal memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kehidupan masyarakat yang di imbangi dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Hal ini dapat menjadi sumber potensial bagi penerimaan pendapatan negara dari sector perpajakan. Pajak sebagai salah satu penerimaan negara dan wujud peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan. (Kuncoro Ari, 2019). Berikut

merupakan data pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor roda dua Kota Malang tahun 2015 – 2020.

Tabel 1
Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua Kota Malang 2015-2020

Tahun	Jumlah Kendaraan
2015	436.123
2016	456.693
2017	476.017
2018	477.687
2019	482.816
2020	361.329

Sumber: UPT Badan Pendapatan Daerah Kota Malang

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas ataupun menengah kebawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi.

Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah (Kemala, 2015). Hal ini tentu menimbulkan dampak positif bagi pemerintah daerah, karena semakin tingginya pengguna kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang diterima oleh daerah akan meningkat. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Meningat pajak tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensinya cukup besar (Kemala, 2015).

Tabel 2
Potensi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (R2) Kota Malang

TAHUN	Penerimaan Pajak PKB R2	Tunggakan Pajak
2015	52,028,063,820	8.052.106.085
2016	55,318,065,000	5.941.150.741
2017	61.993.067.630	9.692.647.947
2018	64.863.403.402	10.265.468.380
2019	67.100.347.561	11.144.507.238
2020	67.681.820.433	11.896.654.363

Sumber: Kantor Bersama Samsat Kota Malang

Peranan pajak tersebut telah menggambarkan pentingnya pajak bagi kelangsungan hidup perekonomian negara. Kemajuan perekonomian negara harus diiringi dengan peningkatan pendapatan. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan negara yaitu dengan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Amri, 2015)

Pengetahuan wajib pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009). Semakin tingginya pengetahuan Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang di dapat maka Wajib Pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan juga sanksi yang akan diterima bila tidak melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan (Oktafiyanto dan Wardani, 2015; Rusmawanti dan Wardani, 2015; Ummah,2015; Wardani dan Rumiyatun, 2017).

Dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai kedisiplinan dalam membayara pajak. Kedispilinan pajak merupakan sikap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Berdasarkan penelitian Rahmanto (2012) semakin tinggi tingkat kedisiplinan wajib pajak dalam membayara pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat Kota Malang. Banyak wajib pajak yang membayar lima (5) tahun sekaligus atau tidak sama sekali. Karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya. Oleh sebab itu sanksi perpajakan sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Rajif, 2012). Akuntabilitas Pelayanan Publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang

diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2008). Apabila petugas Samsat Kota Malang bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat mempengaruhi sumber potensipenerimaannya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berpengaruh pada perkembangan pelayanan instansi-instansi pemerintahan salah satunya pada sektor perpajakan, dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara daring (online). Bentuk layanan yang diberikan Kantor Bersama SAMSAT Kota Malang adalah berupa layanan elektronik SAMSAT atau sering disebut e- SAMSAT. Tujuan dari pelaksanaan layanan e-SAMSAT diharapkan memberikan peningkatan kualitas pelayanan bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang akan membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang sehingga penggunaan layanan e-SAMSAT untuk wajib pajak dapat mempermudah proses pembayaran PKB.

Menurut Ilhamsyah dkk (2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya (Jayanto, 2011).

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Riyatun (2017) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Septiani Ria Yunita, Putu Sukma Kurniawan, dan I Putu Gede Diatmika (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muslikhantul Ummah (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang dilaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh

negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Pajak merupakan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Octovido, Sudjana, dan Azizah, 2014).

Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, seperti kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Pengertian Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:33) bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan pengalihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan patuh dan sadar terhadap hak dan kewajibannya membayar pajak, tanpa harus diancam dan dipaksa oleh beberapa hukuman dan sanksi.

Kedisiplinan Wajib Pajak

Disiplin adalah tata tertib, ketaatan atau kepatuhan pada peraturan bidang studi yang memiliki objek system dan metode tertentu. Tax discipline adalah disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti memasukkan SPT pada waktunya, membayar pada waktunya tanpa diperintahkan untuk hal

itu (Soemitro, 1991:14). Jadi kedisiplinan pajak merupakan sikap patuh, taat yang dimiliki oleh wjaib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam hal perpajakan, tanpa diperingati terlebih dahulu.

Sanksi perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:170) bahwa sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untukmenjamin ditaatinnya peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

Sanksi pajak ada dua macam, yaitu sanksi adminsitrase berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga dan sanksi adminsitrase dapatdiberikan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran atas kewajiban yang telah ditentukan dalam undang- undang umum perpajakan

Penerapan E-SAMSAT

E-SAMSAT (Electronic SAMSAT) merupakan alat untuk memproses pembayaran pajak yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sesuai dengan tempat pembayaran yang sudah tertera dan dapat dipilih salah satu juga batas tanggal masa berlaku pajak kendaraan bermotor (Dewi & P, 2019). Dengan menggunakan sistem e-SAMSAT, proses pembayaran pajak kendaraan bermotor semakin mudah karena wajib pajak tidak perlu mendatangi kantor SAMSAT sehingga kan dapat mempermudah dan menghemat waktu juga biaya (Winasari, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Pada penelitian kuantitatif ini lebih melihat hubungan variabel objek dan didalamnya terdapat statistik deskriptif untuk menganalisis data. Menurut Sugiyono (2013) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan angka dan di analisis setelah mendapat data dari seluruh responden. Obyek penelitian ini adalah indikator-indikator membentuk faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat kota malang. Subyek penelitian yaitu responden yang digunakan peneliti sebagai data atau sumber informasi peneliti. Subyek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji korelasi factor

Tahap ini menguji korelasi variabel-variabel yang telah didefinisikan menggunakan uji barlett (Bartlett's Test of Sphericity) dan Kaiser meyer olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA). Uji Barlett dan uji MSA dilakukan untuk menilai kelayakan suatu variabel yang akan dianalisis menggunakan analisis faktor

1. KMO dan Bartlett's Test

Tabel 1
KMO dan Barlett's Test

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.897
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1224.449
	df	10
	Sig.	.000

Pada output KMO dan Bartlett's Test di atas digunakan untuk menguji kelayakan suatu variable, apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor atau tidak. Caranya dengan melihat nilai KMO MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy). Jika nilai KMO MSA lebih besar dari 0,50 maka Teknik analisis faktor dapat di lanjutkan. Dilihat dari hasil output menunjukkan bahwa nilai KMO MSA sebesar $0,897 > 0,50$ dan nilai Barlett's Test of Sphericity (Sig) $0,000 < 0,05$, maka analisis faktordalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi syarat.

2. Uji MSA

Tabel 2
Anti - Image Matrices setelah uji MSA

Variabel	Nilai MSA	Nilai Standar Minimum
Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor (X1)	0,860	0,5
Wajib pajak membayar pajak kendaraanbermotor tepat waktu (X2)	0,898	0,5
Wajib pajak memenuhi persyaratanmembayar pajak (X3)	0,959	0,5

Wajib pajak mengenali jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor (X4)	0,926	0,5
Wajib pajak memiliki latar pendidikan yang baik sehingga melakukan pembayaran kewajiban perpajakan (X5)	0,916	0,5
Wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai segala peraturan perpajakan kendaraan bermotor (X6)	0,921	0,5
Wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai sanksi apabila melanggar peraturan perpajakan (X7)	0,887	0,5
Wajib pajak memiliki kesadaran dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X8)	0,929	0,5
Wajib pajak memiliki kesadaran untuk melakukan penyelesaian atas kewajiban perpajakan (X9)	0,882	0,5
Sanksi pajak yang diberikan secara jelas kepada wajib pajak kendaraan bermotor (X10)	0,930	0,5
Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor tidak mengenal kompromi (X11)	0,813	0,5
Wajib pajak menggunakan aplikasi E-Samsat dalam membayar administrasi kendaraan bermotor (X18)	0,910	0,5
Wajib pajak mendapatkan sosialisasi penerapan E-samsat (X19)	0,935	0,5
Wajib pajak mengetahui manfaat dan tujuan diterapkannya E-samsat (X20)	0,828	0,5
Wajib pajak mengetahui prosedur penggunaan E-Samsat (X21)	0,829	0,5
Program E-Samsat dapat membantu wajib pajak dalam pembayaran administrasi perpajakan via online (X22)	0,948	0,5

Anti-image Metrics digunakan untuk mengetahui dan menentukan variable mana saja yang layak pakai dalam analisis faktor. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam analisis faktor adalah nilai MSA > 0,50. Dilihat hasil output di atas diketahui

nilai MSA dari masing-masing variable yang di teliti menunjukkan bahwa semua variabel layak untuk dilakukan analisis faktor karena memiliki nilai MSA > 0,50.

Proses faktoring atau ekstraksi

Proses factoring atau ekstraksi adalah proses pemisahan variabel-variabel yang memenuhi korelasi nilai MSA, dimana suatu variabel dikatakan berkorelasi jika nilai MSA lebih besar 0,5. Metode yang digunakan adalah Principal Components Analysis (PCA). Jumlah variabel yang akan diekstraksi terlihat pada table berikut:

1. Communalities

Tabel 3
Kontribusi Variabel Hasil Ekstraksi

X1	1.000	.538
X2	1.000	.738
X3	1.000	.792
X4	1.000	.597
X5	1.000	.671
X6	1.000	.629
X7	1.000	.425
X8	1.000	.555
X9	1.000	.642
X10	1.000	.486
X11	1.000	.573
X12	1.000	.468
X13	1.000	.655
X14	1.000	.730
X15	1.000	.477
X16	1.000	.429
X17	1.000	.538
X18	1.000	.837
X19	1.000	.638
X20	1.000	.508
X21	1.000	.742
X22	1.000	.770

Communalities

	Initial	Extraction
Extraction Method: Principal Component Analysis.		

Tabel Communalities ini menunjukkan nilai variable yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Berdasarkan output yang dihasilkan, semakin besar nilai Extraction maka semakin erat hubungan dengan faktor yang terbentuk. Selanjutnya akan menunjukkan hasil ekstraksi yang lebih spesifik dengan menggunakan metode Principal Components Analysis (PCA) terlihat padanilai Eigenvalue lebih besar atau sama dengan 1,0.

2. Total Variance Explained

Hasil spesifik ekstraksi PCA terlihat pada Tabel Hasil Ekstraksi berikut:

Tabel 4
Hasil Ekstraksi PCA
Initial Eigenvalues

Component	Total	% of Variance	Cumulative %
1	9.441	42.916	42.916
2	1.610	7.319	50.234
3	1.273	5.785	56.019
4	1.113	5.060	61.079
5	.965	4.386	65.465
6	.839	3.815	69.280
7	.814	3.700	72.980
8	.747	3.394	76.374
9	.677	3.079	79.452
10	.643	2.921	82.373
11	.517	2.352	84.725
12	.490	2.225	86.951
13	.466	2.118	89.069
14	.421	1.913	90.981
15	.396	1.802	92.783
16	.350	1.590	94.373
17	.304	1.384	95.757
18	.289	1.313	97.070
19	.207	.939	98.010
20	.190	.864	98.873
21	.150	.680	99.553
22	.098	.447	100.000

Tabel Total Variance Explained menunjukkan nilai masing-masing variable yang di analisis. Dalam penelitian ini ada 22 variabel yang berarti ada 22 Component yang di analisis. Ada dua macam analisis untuk menjelaskan suatu

varian, yaitu Initial Eigenvalues dan Extraction Sums of Squared Loadings. Pada varian Initial Eigenvalues menunjukkan faktor yang terbentuk. Apabila semua faktor dijumlahkan menunjukkan jumlah variable (yaitu $9,441 + 1,610 + 1,273 + \dots + 0,098 = 22$ variabel). Sedangkan pada bagian Extraction Sums of Squared Loadings menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya faktor yang dapat terbentuk. Lihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Jumlah Faktor Hasil Ekstraksi PCA

Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
9.441	42.916	42.916	5.388	24.489	24.489
1.610	7.319	50.234	3.409	15.494	39.983
1.273	5.785	56.019	2.470	11.227	51.210
1.113	5.060	61.079	2.171	9.869	61.079

Pada hasil output di atas ada 4 (empat) variasi faktor dapat terbentuk dari 22 variabel yang di analisis. Dimana syarat untuk menjadi sebuah faktor, maka nilai Eigenvalue harus > 1 . Nilai Eigenvalue Component 1 sebesar 9,441, Component 2 sebesar 1,610, Component 3 sebesar 1,273, dan Component 4 sebesar 1,113 atau semua nilai lebih dari 1.

Rotasi factor

Variabel-variabel yang telah diekstraksi akan dilakukan proses rotasi karena biasanya dalam penempatan variabel belum tepat atau masih ada variabel yang tidak sesuai dengan factor. Proses rotasi dilakukan pada variabel yang lolos dalam uji MSA. Component matrix apat menentukan kontribusi variabel terhadap factor yang terbentuk. Distribusi variabel terlihat pada table berikut:

1. Component Matrix

Tabel 6
Component Matriks sebelum rotasi Varimax

Component Matrix

	Component			
	1	2	3	4

X1	.403	.018	.303	.533
X2	.745	-.031	-.266	.333
X3	.885	-.057	-.057	.041
X4	.572	.249	-.417	-.184
X5	.798	-.151	-.083	-.066
X6	.749	-.076	.145	-.203
X7	.596	-.249	.085	.013
X8	.701	-.080	.147	-.189
X9	.781	-.077	-.125	.104
X10	.527	-.125	-.216	-.383
X11	.432	-.267	-.521	.209
X12	.598	.037	.275	.185
X13	.682	.090	.129	-.406
X14	.258	.812	-.060	-.010
X15	.533	.211	.385	.012
X16	.581	-.111	.110	-.258
X17	.553	.280	-.209	.331
X18	.908	-.012	-.040	.106
X19	.786	-.102	-.104	-.002
X20	.472	-.242	.464	.103
X21	.510	.685	.100	-.052
X22	.867	-.109	.073	-.026

Dari hasil komponen matrix faktor masih sulit menentukan posisi yang tepat terhadap variabel, oleh karena itu komponen faktor harus dirotasi, Rotasi faktor akan memperjelas posisi sebuah variabel tanpa dengan melihat nilai loading terbesar tanpa melihat (+) dan (-). Setelah diketahui bahwa faktor yang terbentuk adalah 4 maka Tabel Component Matrix setelah Rotasi menunjukkan distribusi 22 variabel terhadap 4 faktor yang terbentuk.

Tabel 7
Component Matriks setelah Rotasi
Rotated Component Matrixa

	Component			
	1	2	3	4
X1	-.017	.231	.689	.098
X2	.284	.728	.315	.165
X3	.610	.523	.337	.183
X4	.412	.471	-.190	.411
X5	.633	.462	.226	.073
X6	.704	.201	.274	.131

X7	.485	.288	.316	-.082
X8	.662	.182	.266	.114
X9	.489	.549	.289	.135
X10	.620	.269	-.167	.041
X11	.155	.728	-.042	-.134
X12	.339	.190	.533	.182
X13	.749	.062	.102	.281
X14	.004	.052	.000	.853
X15	.383	-.026	.467	.335
X16	.623	.119	.153	.056
X17	.088	.543	.257	.411
X18	.576	.545	.394	.229
X19	.569	.492	.243	.116
X20	.392	-.006	.582	-.123
X21	.262	.068	.191	.795
X22	.671	.398	.381	.126

Component Matrix ini menunjukkan nilai korelasi antara masing-masing variable dengan faktor yang terbentuk. Hasil rotasi pada Tabel Component Matrix setelah rotasi, menunjukkan bahwa semua variabel memiliki kelompok faktor, dimana sebelumnya belum jelas berada pada faktor berapa, setelah melakukan rotasi didapatkan hasil kelompok faktor yang jelas. Pengelompokan faktor tersebut dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 8
Hasil Interpretasi Variabel

No	Variabel	Faktor	Eigen values	Loading faktor	% of Variance	Kumulatif%
1	X ₃	Pengetahuan Program Perpajakan	9,441	0,610	42,916	42,916
2	X ₅			0,633		
3	X ₆			0,704		
4	X ₇			0,485		
5	X ₈			0,662		
6	X ₁₀			0,620		
7	X ₁₃			0,749		
8	X ₁₆			0,623		
9	X ₁₈			0,578		

10	X19			0,569		
11	X22			0,671		
12	X ₂	Kedisiplinan Wajib Pajak	1,610	0,728	7,219	50,234
13	X ₄			0,471		
14	X ₉			0,549		
15	X11			0,728		
16	X17			0,543		
17	X ₁	Pelayanan Perpajakan	1,237	0,689	5,785	56,019
18	X12			0,533		
19	X15			0,467		
20	X20			0,582		
21	X14	Kompetensi	1,113	0,853	5,060	61,079
22	X21	Prosedur Perpajakan		0,795		

Berdasarkan Tabel di atas maka faktor yang terbentuk adalah:

$$F1 = 0,610X3 + 0,633X5 + 0,704X6 + 0,485X7 + 0,662X8 + 0,620X10 + 0,749X13 + 0,623X16 + 0,578X18 + 0,569X19 + 0,671X22$$

$$F2 = 0,728X2 + 0,471X4 + 0,549X9 + 0,728X11 + 0,543X17 \quad F3 = 0,689X2 + 0,533X4 + 0,467X9 + 0,582X9$$

$$F4 = 0,853X2 + 0,795X4$$

Pembahasan

1. Faktor pengetahuan program perpajakan

Factor pertama diberi nama pengetahuan program perpajakan karena variabel yang mewakili terdiri dari Wajib pajak memiliki kesadaran dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X8), Wajib pajak menggunakan aplikasi E-Samsat dalam membayar administrasi kendaraan bermotor (X18), Wajib pajak mendapatkan sosialisasi penerapan E-samsat (X19), Program E-Samsat dapat membantu wajib pajak dalam pembayaran administrasi perpajakan via online (X22) dan kemudian variabel X3 dengan nilai loading 0.610 , X5=0.633 , X6=0.704, X7 =0.485 , X10=0.620 , X13 =0.749 dan X16 dengan nilai loading 0.623.

2. Faktor Kedisiplinan wajib pajak

Faktor kedisiplinan wajib pajak adalah factor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Factor kedisiplinan memiliki nilai variasi sebesar 7.219%. Faktor kedisiplinan terdiri dari Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor

tepat waktu (X2) , pajak kendaraan bermotor tidak mengenal kompromi (X11) dan juga variabel indikator X4 dengan nilai loading 0.471, X9 = 0.549 dan X17 dengan nilai loading 0.543

3. Faktor pelayanan perpajakan

Faktor pelayanan perpajakan adalah factor ketiga dengan nilai variasi sebesar 5.789%. Faktor ini dibentuk oleh variabel indikator Wajib pajak mendapatkan fasilitas pelayanan dan kenyamanan terbaik pada tempat pelayanan terpadu kendaraan bermotor (X15) , dan juga variabel indikator X1 dengan nilai loading 0,689 ,X12= 0,533 dan X20 dengan nilai loading 0.582

4. Faktor Kompetensi dan Prosedur Perpajakan

Faktor kompetensi dan prosedur perpajakan dibentuk oleh dua variabel indikator yaitu Fiskus memiliki kompetensi, pengetahuan, pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan kendaraan bermotor (X14) dengan nilai loading 0.853 dan Wajib pajak mengetahui prosedur penggunaan E-Samsat (X21) dengan nilai loading sebesar 0.795.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian analisisfactor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajka kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Malang, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Upaya peningkatan penerimaan pajak harus selaras dengan meningkatnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran serta aktif masyarakat sebagai wajib pajak dalam bentuk membayar iuran pajak dapat membantu kelancaran aktivitas pembangunan. Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi daripenerimaan PKB melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sector ini, salah satunya adalah dengan meningkatkan kepatuhanwajib pajak kendaraan bermotor.
2. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terdiri dari empat factor yaitu Faktor pengetahuan program perpajakan dengan nilai eigen values sebesar 9.441%. Faktor kedisiplinan wajib pajak adalah factor kedua dengan nilai eigen values sebesar 1,610%, faktor yang ke tiga adalah Faktor pelayanan perpajakan

dengan nilai eigen values 1,237% serta yang terakhir faktor kompetensi dan prosedur perpajakan dengan nilai eigen values sebesar 1,113%

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, adapun saran yang diberikan antara lain:

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran dalam membayar pajak. Sosialisasi ini dapat melalui media massa berupa surat kabar, baleho dan brosur serta media elektronik berupa iklan di radio dan televisi.
2. Diharapkan pihak pemerintah dan fiskus dapat mempertahankan serta meningkatkan mutu dari sanksi perpajakan.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel -variabel lain diluar variable yang sudah ada dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Batam. *MEASUREMENT: Journal of the Accounting Study Program*, 13(1), 55- 62.
- Amin, M. C., Hamidi, W., & Ekwarso, H. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).
- Amri, P., & Pribadi, U. (2015). Implementasi Pelayanan Samsat Corner dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014. *Journal of Governance and Public Policy*, 2(2), 330-355.
- Ardianti, Desty. (2014). "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota)". *Jurnal Kementerian Pendidikan Nasional Universitas ABrawijaya Fakultas Hukum Malang*.
- Ariesta, R. P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi Kusuma Wardani dan Rumiya. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Vol. 5 Nomor 1*.
- Fajriyan, N. A. (2015). Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib

- Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi DiKelurahan Miji Kota Mojokerto). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).
- Hendri, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Memepengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro. *Akuisasi: Jurnal Akuntansi*, 12(1).
- Ilhamsyah, R. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Irianingsih, E. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar pajak Kendaraan bermotor (PKB) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman). Universitas PGRI Yogyakarta.
- Irianingsih, Eka. (2015). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb)" (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Sleman). *Artikel.Program Studi AkuntansiFakultas Ekonomi Universitas Pгри Yogyakarta*.
- Jati, N. K. M., & Pranata, I. K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24-578.
- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak. *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)*, 2(1).
- Kemala, S. (2015). Pengaruh Harga, Pelayanan, Kualitas Produk, Lingkungan Fisik Dan Lokasipasar Tradisional Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Pasar Bawah Bukittinggi. *jurnal ekonomi*, 18(2), 278- 286.
- Kuncoro, A. (2019). 7. Trends in the Manufacturing Sector under theJokowi Presidency: Legacies of Past Administrations. In *The Indonesian Economy in Transition* (pp. 180-208). ISEAS Publishing.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan. Edisi Revisi*. CV Andi Offset. Yogyakarta. Mardiasmo. (2009). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Jakarta. Penerbit: Andi.
- Masruroh, S., & Zulaikha, Z. (2013). Pengaruh Kemanfaaaan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 435-449.
- Mutia, Sri Putri Tita. (2014). "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang)". *Artikel Ilmiah. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas NegeriPadang*.
- Nur, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Makassar Utara. *Perspektif: Jurnal Pengembangan Sumberdaya Insani*, 3(2), 354-362.

- Prastyowati, I., & Bawono, A. D. B. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2018) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Putra, N., & Setiawan, P.E. (2020). The Effect of Taxpayer Awareness, Service Quality, Taxation Understanding, and Application of E-Filling System on Corporate Taxpayer Compliance.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(2), 1112-1140.
- Rachdianti, F. T. (2012). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan pembanguna dan menggambarkan kemandirian Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui pajak merupakan salah satukomponen Penerimaan Negara (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan diketahui penerimaan Peningkatan penerimaan Negaraini juga diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak, di mana penerimaanpajak pada tahun, 1-7.
- Rizqiyah, I. (2015). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009-2013). Universitas Dian Nuswantoro
- Rusmawanti, Sochi dan Dewi Kusuma Wardani. (2015). “PengaruhPemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Sensus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Memiliki Usaha”. Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 2, Desember 2015
- Salmon dan Elim. 2015. “Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Bersama Samsat Tondano”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA 674 Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 674-684.
- Santoso, Singgih. (2016). Menguasai Statistik dengan SPSS 23. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sari, dkk. (2016). “Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Bitung”
- Sari, R. V. Y., & Susanti, N. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi KepatuhanWajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi danBisnis, 2(1).
- Sasongko, H. A. (2008). Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT UPTD Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Setyawati. (2013). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas”. Skripsi Publikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Edisi Revisi Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siti Kurnia Rahayu, (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sains
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati dan Budiarta. (2013). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Pengetahuan Pajak. Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013): 345-357. ISSN: 2302-8556.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 4(2), 345-357.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 4(2), 345-357.
- Ummah, Muslikhatul. (2015). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Sanksi Pajak. Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang”. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro.Semarang. Indonesia
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program Samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akuntansi Dewantara, 1(2), 106-116.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program Samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akuntansi Dewantara, 1(2), 106-116.
- Wibisono. (2008). Riset Bisnis; Panduan bagi Praktisi dan Akademis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, Tony (2013). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winasari, Anggi. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, sanksi dan Sistem E- Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi 1(01).
- WULANDARI, R. (2019). Pengaruh Kebijakan Administrasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Surabaya Mulyorejo) (Doctoral dissertation, Untag Surabaya)